

DIGITAL GOVERNANCE PADA PLATFORM SIMPATI 2.0 DI KABUPATEN SUMEDANG

***Muhammad Naufal Ali Husni¹⁾**

1)Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran,
Indonesia

Abstrak

Sebagai salah satu kabupaten di Jawa Barat dengan penderita stunting tertinggi mencapai 41,08 persen pada tahun 2018 dan mengalami peningkatan yang cukup serius di masa pandemi saat ini, dimana tercatat dari total 26 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang sebanyak 9.044 anak menjadi penderita stunting.. Pemerintah Kabupaten Sumedang berkomitmen untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan meningkatkan pelayanan kesehatan berbasis digital melalui implementasi Simpati (Sistem Pencegahan Stunting Terintegrasi). Pelaksanaan platform ini menunjukkan bahwa sebelumnya pemerintah belum mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *digital governance* pada platform Simpati di Kabupaten Sumedang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola digital dari platform Simpati belum terlaksana secara optimal karena pengelolaan informasi data belum terintegrasi dengan baik dan terbatasnya akses publik.

Kata Kunci: *Digital Governance*, Kabupaten Sumedang, Simpati, Stunting.

PENDAHULUAN

Dewasa ini pelayanan publik menjadi suatu hal yang penting bagi masyarakat, dimana masyarakat juga memiliki hak menjadi warga negara Indonesia, salah satunya adalah hak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan begitu, pemerintah juga mengupayakan pelayanan terpadu yang dapat membuat pelayanan publik ini menjadi efektif dan efisien, yaitu dengan menghadirkan pelayanan publik yang berbasis digital.

Saat ini kita juga mengetahui adanya *Sustainable Development Goals* (SDGs) dimana hal ini merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan. Hal ini juga menekankan adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau digitalisasi, begitupun untuk pelayanan-pelayanan yang lebih maju atau *digital governance*.

Dengan adanya digitalisasi tersebut juga untuk mengatasi permasalahan seperti kesehatan, salah satunya pada poin ke-2, yaitu *Zero Hunger*, yang berfokus pada

stunting. Stunting merupakan salah satu target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang termasuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan ke-2 yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan (Haskas, 2020).

Namun, dalam pelaksanaannya, penerapan digital governance ini masih mengalami banyak kendala, baik dari sistem yang kurang mumpuni maupun belum optimalnya manajemen data yang dilakukan.

Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan publik hal sebagaimana tercantum dalam dalam pembukaan UUD 1945, terdapat tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu pemerintah banyak membentuk lembaga maupun instansi penyelenggara pelayanan publik. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Menurut Robert dalam (Maryam, 2016), yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah: “Segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di daerah dan lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam barang atau jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketertiban-ketertiban”.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat pada penyelenggaraan Negara, dimana kebutuhan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yaitu tugas negara memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dimana pelayanan tersebut wajib disediakan oleh pemerintah dan kebutuhan tersebut bukanlah semata-mata kebutuhan individu, melainkan kebutuhan yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat.

Dalam Keputusan Men.PAN. Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003, terdapat prinsip pelayanan yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang “relevan, valid” dan “reliable”, (Rinaldi, 2012), yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur pelayanan,
2. Persyaratan Pelayanan,
3. Kejelasan petugas pelayanan,
4. Kedisiplinan petugas pelayanan,
5. Tanggung jawab petugas pelayanan,
6. Kemampuan petugas,
7. Kecepatan pelayanan,
8. Keadilan mendapatkan
9. Kesopanan dan keramahan,
10. Kewajaran biaya pelayanan,
11. Kepastian biaya pelayanan,
12. Kepastian jadwal pelayanan,
13. Kenyamanan lingkungan,
14. Keamanan Pelayanan.

Sejauh ini teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang berkembang sudah memadai untuk dapat memfasilitasi juga memudahkan beragam pekerjaan. terdapat berbagai macam pekerjaan, seperti eksplorasi, pencatatan, pendataan, penghitungan atau pengolahan data, analisis, penggambaran, visualisasi, dan pengemasan dalam format akhir laporan, dapat dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi ensiklopedia (*interactive CD-ROM, multimedia*), *world-wide-web*, pengolah kata, *spreadsheet, graphic design, presentation tools*, dan sebagainya (Suryadi, 2007).

Selain itu juga saat ini terdapat sarana secara teknologi untuk berinteraksi, seperti dengan adanya *social media, e-mail, chat, voicemail, tele-conference*. Dengan adanya hal tersebut sangat memudahkan setiap individu dalam berinteraksi dimanapun dan kapanpun, begitu juga pada setiap lembaga, yang salah satu contohnya perkuliahan dengan menggunakan *tele-conference* juga dengan mudah mendatangkan para pembicara ternama atau pemegang kedudukan untuk saling berbagi ilmu. ICT ini perlu

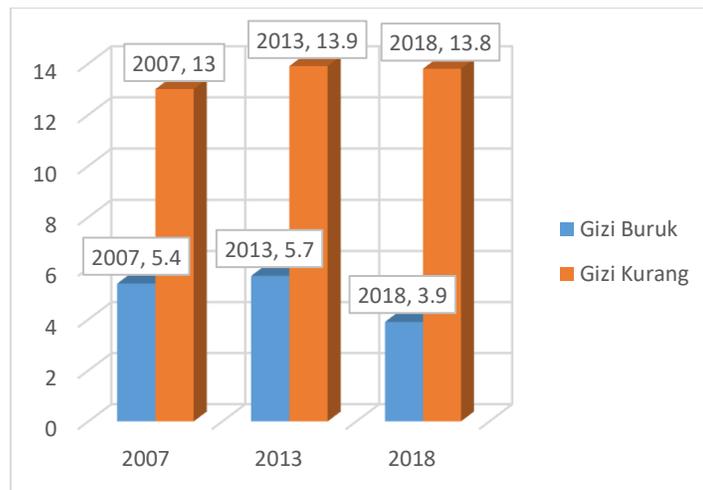
di transformasikan untuk pelayanan publik, dewasa ini juga pemanfaatan ICT oleh pemerintah dapat dikatakan sebagai *e-Government*. Menurut World Bank (Cahyadi, 2003), *e-Government* didefinisikan sebagai “Penggunaan/pemanfaatan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, pelaku bisnis, dan sekaligus memfasilitasi kerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya”. Pemanfaatan ICT tersebut seperti *Wide Area Network, Internet, Mobile Computing*, dimana selanjutnya dapat mendukung transformasi hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis, dan institusi pemerintah lainnya.

Pemanfaatan teknologi informasi (ICT) ini bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih baik, meningkatkan hubungan yang baik antara pemerintah dengan bisnis serta industri, memberdayakan masyarakat melalui akses terhadap informasi, serta meningkatkan efisiensi manajemen pemerintahan. Selain itu terdapat keuntungan lain dari pemanfaatan teknologi informasi oleh institusi pemerintah seperti dapat mengurangi korupsi, meningkatkan transparansi, meningkatkan kenyamanan, meningkatkan pendapatan, dan atau dapat mengurangi biaya (Pratama & Hersya, 2015).

Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Mengingat, kesehatan merupakan satu kebutuhan penting dalam kehidupan masyarakat yang secara tidak langsung dapat berdampak pada pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang lebih produktif secara ekonomi dan sosial. Hal ini, selaras dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang merupakan dasar hukum dalam proses pembangunan kesehatan di Indonesia. Di mana pembangunan kesehatan di laksanakan atas dasar perikemanusiaan, perlindungan, keadilan, dan tentunya penghormatan akan hak dan kewajiban manusia dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat, akan tetapi sampai saat ini pelayanan tersebut belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini terbukti dari masih adanya permasalahan

gizi pada ibu hamil, baduta (anak usia 0-23 bulan), balita (anak usia 0-59 bulan), dan pada anak dan remaja (anak usia 5-12 tahun) yang tidak kunjung tuntas. Permasalahan mengenai gizi harus diperhatikan dengan serius oleh pemerintah, karena dapat berdampak panjang dan menimbulkan beberapa masalah baru seperti dapat menyebabkan stunting, disabilitas, morbiditas, dan mortalitas. Tidak hanya itu permasalahan kesehatan mengenai gizi juga dapat berdampak besar pada keberlangsungan dan ketahanan hidup suatu bangsa.



Grafik 1.1

Proporsi Status Gizi Buruk dan Gizi Kurang Pada Balita (2007-2018)

Sumber : diolah penulis dari (Kementerian Kesehatan RI, 2018)

Berdasarkan grafik 1.1, dapat dilihat bahwa dari tahun 2007-2018 masih terdapat permasalahan kesehatan mengenai gizi di Indonesia, ada yang mengalami penurunan dan ada yang fluktuatif. Pertama, dilihat dari proporsi status gizi buruk pada balita yang dari tahun ke tahun mengalami penurunan meskipun tidak signifikan yaitu secara berturut-turut 5,4%, 5,7%, dan 3,9%. Selanjutnya untuk proporsi status gizi kurang pada balita mengalami fluktuatif di mana pada tahun 2007 yaitu 13% dan mengalami kenaikan di tahun 2013 sebesar 0,9% dan pada akhirnya di tahun 2018 yaitu sebesar 13,8%.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan gizi di Indonesia, maka ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi. Di mana pelayanan gizi dilakukan untuk mewujudkan

perbaikan gizi pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan usia lanjut dengan prioritas kepada kelompok rawan gizi yang terdiri dari bayi dan balita, anak usia sekolah dan remaja perempuan, ibu hamil, nifas dan menyusui, pekerja wanita, dan usia lanjut. Selain itu, upaya lain ditunjukkan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang. Akan tetapi, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, rupanya belum dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi, mengingat masih banyak permasalahan kesehatan di beberapa Kota/Kabupaten di Indonesia, salah satunya yang terjadi di Kabupaten Sumedang yang mengalami permasalahan pembangunan kesehatan seperti permasalahan stunting.

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan penderita stunting terbanyak yaitu mencapai 41,08% (BAPPEDA JABAR, 2018). Di mana terdapat tujuh desa yang termasuk ke dalam daftar berisiko tinggi stunting karena memiliki indeks risiko stunting sangat tinggi yaitu Desa Ciawitali, Tanjungwangi, Cibungur, Cijambu, Pangadegan, Suriamedal, dan Kedakajaya. Kondisi pandemi saat ini juga memiliki dampak serius terhadap kenaikan angka stunting di Kabupaten Sumedang di mana terjadi kenaikan sebesar 3,28% yang dalam hal ini dari total 26 kecamatan terdapat 9.044 atau 12,05% anak yang mengalami stunting. Selain itu, apabila dilihat dari batas masalah *underweight* lebih dari 10%, terdapat enam kecamatan di Kabupaten Sumedang yang termasuk ke dalam daerah rawan gizi diantaranya, Kecamatan Cibugel, Ujungjaya, Jatigede, Surian, Jatinangor, dan Ganeas. Sedangkan apabila dilihat dari batas masalah *westing* lebih dari 5% yang termasuk kecamatan di Kabupaten Sumedang dengan jumlah kasus “gizi kurang” tertinggi berada di Kecamatan Tomo, Surian, Jatinangor, Cisitu, Cibugel, dan Ujungjaya. Terakhir, Kecamatan Cibugel dan Tanjungmedar merupakan dua kecamatan di Kabupaten Sumedang dengan jumlah kasus stunting terbanyak yang ditinjau berdasarkan batas masalah stunting lebih dari 20% (Aminullah, 2020)

Untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik pemerintah Kab. Sumedang meningkatkan pelayanan dengan pemanfaatan *digital governance* yaitu melalui aplikasi SIMPATI 2.0. SIMPATI (Sistem Pencegahan Stunting) adalah salah satu program

Sumedang Digital Region hasil kerjasama Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan Telkomsel. SIMPATI ini diharapkan dapat menjadi salah satu katalisator dalam pencegahan stunting di Kabupaten Sumedang di sisi pengumpulan dan pelaporan data balita yang berkaitan dengan hal tersebut. Selain dalam format aplikasi Android, juga tersedia dalam bentuk aplikasi web dan *messaging/conversational*. SIMPATI ini dapat digunakan oleh berbagai pihak. Mulai dari kader posyandu untuk melakukan pencatatan pemeriksaan berat badan dan tinggi anak, untuk pimpinan daerah, puskesmas, desa dan dinas terkait lainnya untuk mendapatkan laporan terkait dengan stunting. Masyarakat umum/orang tua juga dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk melakukan pengecekan status gizi anak. Akan tetapi berdasarkan peninjauan awal peneliti menemukan beberapa indikasi masalah yaitu :

1. Aplikasi ini belum terintegrasi antar seluruh instansi pemerintah. Pada aplikasi simpati 2.0, hanya aktor-aktor tertentu saja yang bisa mengakses. Karena ketika akan menampilkan berbagai menu atau fitur yang ada pada aplikasi ini harus memasukan email serta password yang sudah terverifikasi. Patrick Dunleavy, seorang Sarjana Inggris, mengemukakan sebuah teori digital governance. Dia secara sistematis menguraikan isi utama dan keuntungan dari konsep *digital governance*. *Smart city* menggunakan teknologi atau informasi digital dan teknologi komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kualitas dan kinerja layanan perkotaan, dan mengubah mode interaksi antara pemerintah, perusahaan atau swasta dan publik melalui big data, komputasi awan, dan internet berbagai hal. Membangun *Smart city* membutuhkan banyak hal dasar informasi, yang didasarkan pada *Big Data*. Penerapan *Digital Governance* pada *Smart City* membutuhkan integrasi sumber informasi di semua aspek politik, ekonomi dan budaya. Pada konsep Patrick tersebut, bahwa integrasi dalam berbagai aspek terutama sangatlah penting. Misalkan Dinas PUPR Sumedang yang mungkin bukan salah satu aktor strategis dalam program ini, namun sewaktu-waktu membutuhkan data dalam aplikasi tersebut, maka harus terlebih dahulu menghubungi admin. Penulis menyimpulkan aplikasi ini masih belum mencerminkan integrasi yang seharusnya ada pada konsep digital governance.

2. Aktor yang memiliki akses terhadap aplikasi Simpati 2.0 hanya bisa mengakses menu mereka, tidak bisa mengakses menu lain. Dalam aplikasi tersebut terdapat menu posyandu, eksekutif, desa, kecamatan, puskesmas serta orang tua. Misalkan pihak desa, hanya bisa mengakses menu desa, tidak bisa mengakses menu posyandu yang ada dalam desa tersebut. Begitu pun seluruhnya. Seperti yang sudah dipaparkan di atas bahwa ketika akan masuk ke salah satu menu kita harus terlebih dahulu memiliki akses berupa email beserta password yang sudah terverifikasi.
3. Aplikasi Simpati 2.0 belum dapat diakses oleh publik. Penulis meyakini bahwa Digital governance tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan bernegara sekarang ini, arus komunikasi yang begitu kuat mengalir dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu, organisasi, maupun sebagai pemerintah. Oleh karenanya, aplikasi ini seharusnya dapat diakses oleh publik, misalnya untuk kebutuhan penelitian atau pun kebutuhan lainnya.
4. Belum adanya analisis jabatan yang baik pada program ini terutama pada SDM dan pembagian tugas. Hal tersebut ditemukan pada manajerial Sawala, pihak ketiga yang mengurus operasional aplikasi Simpati 2.0. Pembagian tugas pada masing-masing SDM Sawala masih terdapat tugas yang tumpang tindih. Misalkan seorang customer service yang juga merupakan promotor yang mensosialisasi secara lapangan ke masing-masing posyandu. Hal tersebut membuat setiap individu di Sawala harus double-job atau bahkan lebih yang memiliki kecenderungan kurang optimalnya ketercapaian pelayanan yang baik. Misalkan customer service tersebut sedang melakukan penyuluhan ke posyandu a, namun posyandu b sedang membutuhkan jawaban yang cepat terkait konsultasinya ke *customer service*, sehingga dalam hal ini komunikasi efektif tidak tercapai.

Sebelumnya terdapat penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu *Digital Governance Model for Big Data Era Based on Typical Practices in Singapore* (Ting Lei dan Yuwei Tang, 2019). Jurnal ini membahas mengenai penyelenggaraan *Digital Governance* pada era *Big Data* di Singapura terkait. Penulis menggambarkan latar belakang yang jelas dan berkaitan

dengan *Digital Governance* yang membuat relevan terkait hal apa yang akan penulis teliti. Lei dan Tang menjelaskan bahwa *Digital Governance* muncul sebagai akibat dari perkembangan era digital, yang menuntut kita untuk menyesuaikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beraktivitas. Dunleavy (2015:1). Dalam tulisannya, penulis memberikan gambaran bagaimana birokrasi di Singapura berjalan sesuai dengan konsep *digital governance*. Pada bagian pembahasan, penulis memberikan 3 point substansi mengenai *Implementation Path of Digital Government, Implementation Path of Digital Economy, dan Implementation Path of Digital Society*. 3 Point pembahasan itu cukup menggambarkan 2 benang merah antara digital dan governance.

Penelitian terdahulu yang juga relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah Komunikasi Pembangunan Dalam Pembangunan Administrasi Melalui Digital Governance (Samsul Rani, 2017). Jurnal ini membahas bagaimana peranan komunikasi pembangunan dalam proses pembangunan administrasi dengan menggunakan konsep digital governance. Samsul Rani menjelaskan bagaimana latar belakang lahirnya digital governance dan bagaimana keterkaitannya dengan pembangunan administrasi yang sedang berjalan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan *digital governance* pada *platform* Simpati 2.0 (Sistem Pencegahan *Stunting* Terintegrasi). Di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan dalam pengembangan pengetahuan ilmu administrasi publik dengan topik dan kajian yang sama. Kemudian, dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan *digital governance* pada *platform* Simpati 2.0 (Sistem Pencegahan *Stunting* Terintegrasi) agar kedepannya menjadi lebih optimal.

TINJAUAN PUSTAKA

Digital Government diartikan sebagai penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pemerintahan. Di mana memiliki tujuan untuk mengubah hubungan

antara pemerintah dan masyarakat secara positif. Dengan menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi, pemerintah dapat melakukan modernisasi penyampaian atau pelaksanaan layanan publik dan akan lebih banyak melibatkan masyarakat dalam aspek politik. Di mana adanya kesempatan kepada warga negara untuk memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan politik. Akibatnya, *digital government* berpotensi mengubah hubungan sedemikian rupa sehingga masyarakat memandang pemerintahan lebih partisipatif, bertanggung jawab, transparan, responsif, efisien, dan efektif (Sandoval-Almazán et al., 2017).

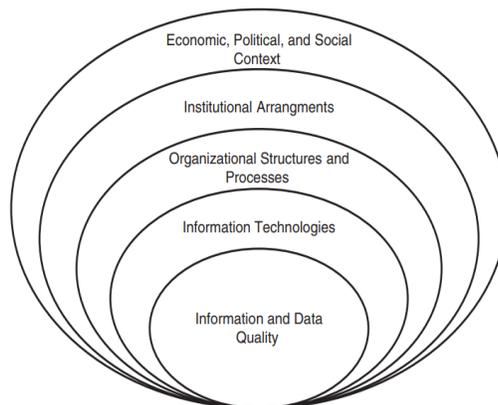
Kemajuan teknologi abad kedua puluh satu telah mengubah berbagai hal salah satunya pada sektor pemerintahan. Tren sosial dan teknologi meningkatkan tekanan pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih baik, adanya kolaborasi yang harmonis diantara pemerintah dengan berbagai pihak, kemudian, adanya keterbukaan dan kemudahan dalam mengakses data dan informasi yang dapat mendorong inovasi di masyarakat dan sektor swasta.

Ada banyak definisi mengenai *digital government*, beberapa dari mereka merujuk secara eksklusif ke penyediaan layanan publik melalui penggunaan Internet dan teknologi terkait lainnya. Definisi lainnya lebih luas dan mendefinisikan pemerintahan digital sebagai pilihan, desain, implementasi, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di sektor publik, yang dapat mencakup telepon, dan teknologi lain yang tidak selalu terkait dengan internet. Ada juga upaya untuk membuat konsep *digital government* menurut hubungannya antara pemerintah tertentu dan aktor sosial lainnya seperti warga negara, sektor swasta, dan pemerintah lainnya. Demikian pula, *digital government* yang dikonseptualisasikan berdasarkan fungsi-fungsi teknologi informasi seperti adanya, interaksi, transaksi, integrasi, atau partisipasi yang merupakan cara untuk memahami evolusi dan kesuksesan pelaksanaan *digital government*. Cara lain untuk memahami pemerintahan digital didasarkan pada tingkat perubahan kelembagaan dan operasional yang diperlukan.

Integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menghadirkan peluang dan manfaat besar bagi pemerintah. Namun tidak dapat dipungkiri, hambatan, seperti sumber daya manusia atau infrastruktur teknologi yang tidak memadai, kurangnya

kerangka peraturan yang tepat, format data yang beragam, literasi digital yang rendah, ketidakpastian tentang pengaruh teknologi baru pada praktik kerja, dan kurangnya kesediaan untuk menggunakan teknologi baru, menghalangi upaya saat ini dalam memodernisasi proses administrasi publik.

Pelaksanaan *digital government* harus dipahami sebagai upaya multidimensi, dimana aspek seperti struktur organisasi, pengaturan kelembagaan, dan praktik kerja, sama pentingnya dengan informasi dan teknologi yang digunakan. Oleh karena itu, (Sandoval-Almazán et al., 2017) menjelaskan suatu kerangka pemikiran sederhana yang merujuk pada terbentuknya sebuah konsep *digital government* yang di dalamnya termuat beberapa faktor utama dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan *digital government*, yaitu sebagai berikut:



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran Digital Government

Sumber: (Sandoval-Almazán et al., 2017)

Welchman (2015:11) berpendapat bahwa “*digital governance is a framework for establishing accountability, roles, and decision-making authority for an organization s digital presence, which means its websites, mobile sites, social channels, and any other Internet and web, enabled products and services*” yang bermakna *Digital governance* memiliki kerangka kerja tata kelola digital yang dirancang dengan baik dalam wujud transformasi pelayanan publik untuk mengatasi segala potensi dan permasalahan dimana

hadirnya digital dalam kehidupan terutama dalam organisasi publik tetapi disisi lain banyaknya stakeholder yang belum terakomodir agar memperjelas siapa yang memiliki otoritas dan kontribusi pengambilan keputusan (Welchman, n.d.).

Welchman menjelaskan lebih jauh bahwa dalam *digital governance* terdapat tiga yang harus diperhatikan yaitu:

1. Digital Strategy, strategi digital diartikan sebagai pendekatan organisasi untuk memanfaatkan kemampuan internet dan world wide web, dan memiliki dua aspek yaitu prinsip panduan dan sasaran kinerja.
2. Digital Policy, kebijakan digital yang melandasi pengelolaan pelayanan secara online.
3. Digital Standart, standar digital untuk memastikan kualitas dan efektivitas digital yang optimal, seperti kedalaman informasi, strategi, serta spesifikasi taktis yang terkait dengan informasi.

METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian pada penyelenggaraan program aplikasi Simpati (Sistem Pencegahan Stunting Terintegrasi) di Kabupaten Sumedang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian ini menekankan pada data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang yang menjadi sumber perilaku yang diamati, yang bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan dan proses terbentuknya digital government dalam penyelenggaraan aplikasi Simpati (Sistem Pencegahan Stunting Terintegrasi) di Kabupaten Sumedang.

Alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan penelitian kualitatif ini yaitu, menggunakan alat perekam suara saat melakukan wawancara, menyiapkan pedoman wawancara dan transkrip notula untuk mencatat hasil wawancara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Lalu informan untuk wawancara dari penelitian ini adalah Kepala Sub Bidang Sosial Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kependudukan, Bappeda Kabupaten Sumedang.

Pada tahap pengelolaan dan analisis dilakukan dengan tiga tahap yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Dengan pemeriksaan keabsahan yaitu dilakukan dengan Teknik triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Information and Data Quality

Secara prinsip, sebuah media penyalur informasi yaitu aplikasi dalam hal ini haruslah dapat menjawab segala kebutuhan para pengguna. Bahkan kualitas informasi dari suatu aplikasi sangat penting yang direpresentasikan dalam setiap fiturnya dan dapat diukur tingkat detailnya (Sandoval-Almazán et al., 2017). Berhubungan dengan aplikasi milik organisasi publik, salah satu cara mengukur apakah informasi dari suatu aplikasi baik atau tidaknya dapat terlihat dari kualitas datanya apakah mampu menjawab kebutuhan publik, kurang atau bahkan tidak sama sekali. Pada aplikasi Simpati 2.0, terdapat enam menu atau fitur utama yaitu menu posyandu yang menyajikan data perkembangan anak di tiap unit posyandu, menu desa yang menyajikan perkembangan anak di tiap unit posyandu yang ada di desa tersebut, menu kecamatan yang menyajikan perkembangan anak di tiap desa yang ada di kecamatan tersebut, menu puskesmas yang menyajikan data perkembangan anak beberapa desa sekitar lingkungan kerja puskesmas, menu orang tua yang mana tiap orang tua dapat mengecek secara mandiri terkait kesehatan anak dan terakhir menu eksekutif yang merupakan fitur yang digunakan oleh bupati, Sekda dan atau Bappeda untuk memasukan pendataan dan pemeriksaan anak.



Gambar 1.1

Tampilan utama aplikasi Simpati 2.0

Berdasarkan penuturan Ibu Mety selaku Kepala Sub Bidang Sosial Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kependudukan, Bappeda Kabupaten Sumedang. Saat wawancara, dalam aplikasi Simpati 2.0 kita bisa mengetahui perkembangan anak secara detail beserta identitasnya, terdapat indikator perkembangan setiap anak masuk ke dalam indikator apa dan bagaimana *treatment* yang harus diberikan. Dalam aplikasi ini pun ada berbagai artikel terkait masalah kesehatan stunting, edukasi pencegahan dan penanganan stunting, artikel perkembangan program Simpati baik saat mendapatkan penghargaan atau pun hal lainnya dan juga tema artikel lainnya.

4.2 Information Technologies

Teknologi informasi menjadi hal yang fundamental dalam pelaksanaan e-government karena digitalisasi sebagai penanda bahwa sistem pemerintahan ini sudah dimulai. Dalam konteks *good governance*, setiap program pemerintah harus terintegrasi dan pertukaran informasi antara dua atau lebih antara pemerintahan, swasta maupun publik (Sandoval-Almazán et al., 2017). Namun sayangnya setiap menu yang ada pada aplikasi ini memerlukan email yang terdaftar dan sudah terverifikasi. Sehingga setiap menu tidak bisa diakses semua. Misalkan orang yang memiliki akses menu poyandu tidak bisa membuka menu desa, orang yang memiliki akses menu desa tidak memiliki akses menu kecamatan, pun menu eksekutif tidak dapat mengakses lima menu lainnya. Jadi publik pun tidak dapat mengakses setiap menu yang ada ketika akan membutuhkan data untuk penelitian atau pun keperluan lainnya. Walaupun publik bisa menggunakan beberapa fitur seperti membaca artikel yang ada pada aplikasi tersebut. *Good governance* haruslah terintegrasi antara pemerintah, swasta dan publik. Sehingga aplikasi ini masih belum memenuhi standar ideal *good governance*.

4.3 Organizational Structures and Processes

Dalam pelaksanaan *digital government* pada aplikasi Simpati (sistem pencegahan *stunting* terintegrasi) di Kabupaten Sumedang terkait dengan struktur organisasi peneliti melihat dari adanya pembagian kerja yang sudah sangat jelas dan tegas, di mana hal tersebut termaktub dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 82 Tahun 2019

tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi, kemudian dipertegas dengan adanya Keputusan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor: 441/KEP. 325-BAPPPEDA/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh (Robbins, 1996) bahwa di dalam struktur organisasi adanya proses pembagian kerja dan tugas yang dibagi secara berkeadilan sesuai dengan kompetensi yang dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal.

Pemerintah Daerah sampai dengan tingkat Pemerintah Desa di Kabupaten Sumedang memiliki tugas dan bertanggungjawab untuk melakukan itegrasi, intervensi, sinkronisasi, pemantauan, sampai dengan melakukan pergerakan multisektor. Kemudian, untuk organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa dan juga masyarakat memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melakukan edukasi, pelatihan sekaligus pemantauan dalam penerapan aplikasi Simpati dalam rangka pelaksanaan percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Sumedang. Selanjutnya untuk organisasi profesi dan akademisi memiliki tugas dan tanggungjawab dalam hal melaksanakan pengembangan program, pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat. Selain itu yang tidak kalah penting terdapat Gugus Tugas yang memiliki tugas salah satunya melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 8 (delapan) aksi intervensi konvergensi penurunan *stunting* terintegrasi oleh seluruh *stakeholder* terkait yang terdiri dari:

1. Analisa situasi;
2. Rencana kegiatan;
3. Rembuk *stunting*;
4. Perbub tentang peran desa;
5. Kader Pembangunan Manusia;
6. Manajemen data;
7. Pengukuran dan publikasi;
8. *Review* kinerja tahunan.

Berdasarkan hasil observasi evaluasi eksternal pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi *stunting* Kabupaten Sumedang pada Tahun 2020 yang tetuang dalam SK

Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Nomor KPG.03.01.01/4374/PPM tanggal 30 November 2020 menunjukkan bahwa dari 21 (duapuluh satu) indikator 19 diantaranya mendapatkan nilai A, namun dua diantaranya mendapatkan nilai B dan C. Untuk indikator cakupan desa dengan data 20 indikator utama memperoleh nilai C dan indikator pembelajaran dari reviu kinerja memperoleh nilai B. Berdasarkan hal tersebut, membuat pemerintah Kabupaten Sumedang berhasil meraih beberapa penghargaan yaitu Terbaik 1 Kategori Kabupaten dengan Kinerja Terbaik dalam Pelaksanaan Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* di Tahun ke II Tingkat Jawa Barat Tahun 2020, kemudian memperoleh penghargaan sebagai Kabupaten Paling Replikatif Tingkat Jawa Barat. Selain itu Pemerintah Kabupaten Sumedang juga berhasil meraih penghargaan tingkat nasional sebagai Terbaik III dalam Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tingkat Nasional Regional II Tahun 2020.

Gambar 2.2

Pada saat penyerahan penghargaan sebagai Juara 1 Terbaik Kategor Kabupaten dengan Kinerja Terbaik dalam Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* di Tahun ke II Tingkat Jawa Barat Tahun 2020



(Sumber: Bappeda Kabupaten Sumedang*diolah peneliti)

Di mana pelaksanaan percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* terintegrasi yang dilakukan oleh seluruh *stakeholder* terkait menjangkau seluruh lokasi prioritas yang setiap tahunnya mengalami perluasan cakupan lokasi di mulai sejak tahun 2019

hingga tahun 2021 tercatat terdapat 32 desa prioritas dan untuk tahun 2022 telah ditetapkan penambahan 16 desa prioritas yang dalam hal ini telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 151 Tahun 2021 tentang Penetapan Perluasan Desa Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Di Kabupaten Sumedang Tahun 2022.

No	Desa	Kecamatan
1	Cipasang	Cibugel
2	Jayamekar	Cibugel
3	Tamansari	Cibugel
4	Dayeuhluhur	Ganeas
5	Cintajaya	Jatigede
6	Kadu	Jatigede
7	Cileles	Jatinangor
8	Hegarmanah	Jatinangor
9	Suriamukti	Surian
10	Boros	Tanjungkerta
11	Kertaharja	Tanjungkerta
12	Mulyamekar	Tanjungkerta
13	Tanjungmulya	Tanjungkerta
14	Gudang	Tanjungsari
15	Pasigaran	Tanjungsari
16	Kudangwangi	Ujungjaya

Tabel 1.1

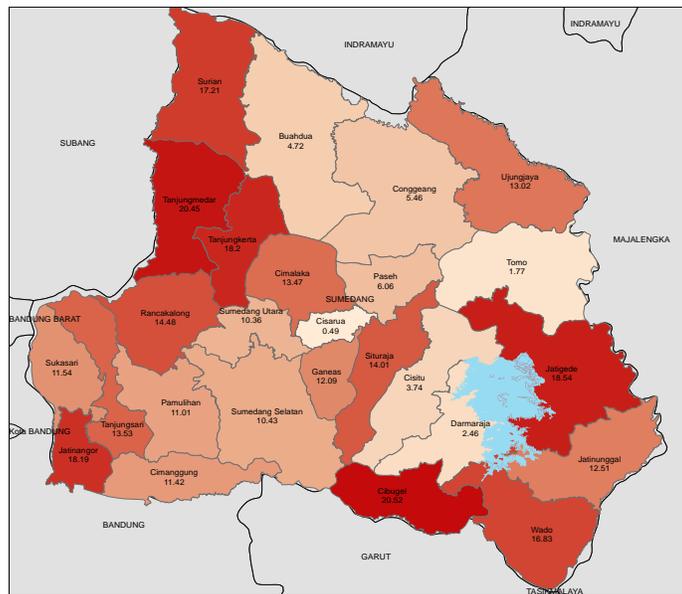
16 Desa Lokasi Perluasan Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2022

(Sumber: Bapppeda Kabupaten Sumedang*diolah peneliti)

Berdasarkan hasil evaluasi internal tahun 2020 Gugus Tugas Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Sumedang. Tren proporsi balita *stunting* tahun 2019 hingga tahun 2020, mengalami peningkatan di 9 Kecamatan dan mengalami penurunan di 17 Kecamatan. Di mana 2 Kecamatan dengan proporsi balita *stunting* tinggi (>20%) berada di Kecamatan Cibugel dan Tanjungmedar. Di mana penyebab tingginya proporsi balita *stunting* antara lain, aktifitas posyandu yang tidak

berjalan secara optimal akibat adanya pandemi Covid-19, konvergensi program terganggu akibat *refocusing* anggaran, dan penambahan alat antropometri yang menyebabkan akurasi pengukuran lebih baik. Di mana data sebaran proporsi balita stunting di Kabupaten Sumedang Tahun 2020 dapat terlihat pada Gambar 1.2 dan 1.3.

Gambar 1.2
Peta Sebaran Proporsi Balita *Stunting* Tahun 2020 (Hasil Bulan Penimbangan Balita, Agustus 2020)



(Sumber: Bapppeda Kabupaten Sumedang*diolah peneliti)

Selain itu, dimensi ini berkaitan erat dengan adanya saluran komunikasi yang baik, dan adanya otoritas pemimpin yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan aplikasi Simpati (sistem pencegahan stunting terintegrasi) di Kabupaten Sumedang. Di mana dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian bentuk komunikasi yang terjalin diantara *stakeholder* terkait dilakukan secara formal dan informal. Untuk komunikasi informal dilakukan dengan memanfaatkan media komunikasi seperti WA Grup untuk koordinasi dan konsolidasi. Sedangkan bentuk komunikasi formal salah satunya dapat terlihat dari pelaksanaan “Rembuk *Stunting*” yang sekaligus merupakan aksi konvergensi ke 3 (tiga) dalam upaya penurunan *stunting*. Pelaksanaan rembuk *stunting* yang terakhir dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 di mana dihadiri oleh seluruh *stakeholder* terkait seperti Pemerintah Daerah (Bupati, Wakil Bupati, Sekertaris

Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bappppeda dan jajaran), sampai pemerintah tingkat desa yang termasuk ke dalam desa prioritas, selain itu dihadiri oleh pihak swasta (Telkomsel), akademisi (STIKes April Sumedang), media, sampai dengan komunitas. Di mana di dalam forum tersebut dilakukan proses diskusi dan diakhiri dengan penandatanganan komitmen dan kesepakatan bersama yang terdiri dari 6 (enam) poin, diantaranya:

1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dalam penurunan dan pencegahan *stunting*;
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif dalam penurunan dan pencegahan *stunting*;
3. Meningkatkan ketersediaan dan kompetensi pelaksana program dan kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif dalam penurunan dan pencegahan *stunting* di tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten;
4. Meningkatkan manajemen data mulai dari pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pemanfaatan data dalam penurunan dan pencegahan *stunting*;
5. Melakukan akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif dengan prioritas kelompok sasaran di desa prioritas penurunan dan pencegahan *stunting* Kabupaten Sumedang Tahun 2021;
6. Menyusun dan menyepakati program dan kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif dengan prioritas kelompok sasaran berada di desa prioritas penurunan dan pencegahan *stunting* Kabupaten Sumedang Tahun 2022 yang dicantumkan dalam dokumen rencana kerja.

Gambar 1.4

Pelaksanaan Rembuk *Stunting* Tanggal 24 Mei 2021



(Sumber: Bappppeda Kabupaten Sumedang*diolah peneliti)

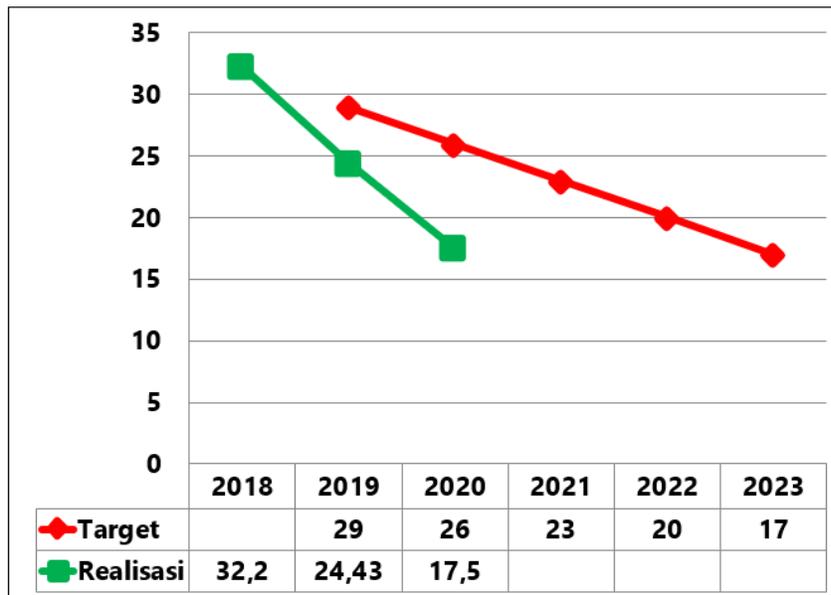
4.4 Institutional Arrangements

Berdasarkan hasil observasi peneliti melihat bahwa pelaksanaan *digital government* melalui aplikasi Simpati (sistem pencegahan *stunting* terintegrasi) sebagai salah satu upaya dalam percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Sumedang dilakukan secara kolaborasi dengan model *pentahelix*. Di dalam perspektif administrasi publik, kolaborasi merupakan bentuk kerja sama dengan beberapa pihak yang terkait dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan (Utami & Pancasilawan, 2017).

Kolaborasi muncul akibat keterbatasan dari pihak pemerintah sebagai pelayan publik untuk mencapai suatu tujuan yang perlu melibatkan pihak lain agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Hal ini selaras dengan yang terjadi di Pemerintahan Kabupaten Sumedang di mana sebelumnya dalam upaya penurunan dan pencegahan *stunting* belum dapat dilakukan secara optimal, yang disebabkan oleh berbagai macam hal salah satunya pada proses pendataan kasus *stunting* masih dilakukan secara manual dan menghabiskan banyak waktu yang berdampak pada proses pengambilan keputusan

oleh pemerintah yang dituangkan dalam bentuk program atau kebijakan upaya percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* acap kali mengalami keterlambatan dan secara langsung mempengaruhi tingkat kasus di Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan seperti yang terjadi pada tahun 2018 sebelum dilakukan kolaborasi yaitu mencapai 32,2% dan terus mengalami penurunan setelah dilakukan integrasi dan kolaborasi. Sebagaimana terlihat pada gambar 1.5.

Gambar 1.5
Data Target dan Realisasi Kasus *Stunting* di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023



(Sumber: Bappppeda Kabupaten Sumedang*diolah peneliti)

Konsep *pentahelix* merupakan interaksi atau hubungan antara *business*, *academic*, *community*, *government* dan *media* (Setya Yunas, 2019). Dalam hal ini seluruh pihak terkait saling bersinergi dan berkolaborasi satu sama lain dalam optimalisasi percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Sumedang melalui aplikasi Simpati (sistem pencegahan *stunting* terintegrasi).

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Kabupaten Sumedang memiliki tanggung jawab untuk dapat melakukan integrasi, sinkronisasi, pelaksanaan intervensi, penggerakan multisektor dan pemantauan dalam percepatan penurunan dan pencegahan

stunting terintegrasi di Kabupaten Sumedang melalui aplikasi Simpati (sistem pencegahan *stunting* terintegrasi).

Untuk unsur *business* atau pihak swasta memiliki peran dalam menghadirkan infrastruktur teknologi, hal ini dilakukan oleh Telkomsel melalui penyediaan aplikasi Simpati yang merupakan tindak lanjut dari konsep yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* yang berdampak secara langsung salah satunya pada proses pendataan yang dapat dilakukan secara cepat dengan pemanfaatan aplikasi Simpati. Selain itu Telkomsel juga memberikan bantuan berupa gadget, kartu dan kouta gratis, kemudian yang tidak kalah penting adalah adanya kegiatan pelatihan dan pendidikan para kader posyandu di seluruh desa prioritas sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan dan keputusan bupati melalui bantuan mitra Sawala Foundation dalam proses pelatihan.

Gambar 1.6
Pelatihan Kader Posyandu dalam Penggunaan Aplikasi Simpati



(Sumber: Bapppeda Kabupaten Sumedang)

Selanjutnya, akademisi memiliki peran sebagai konseptor yang berkontribusi untuk mengembangkan riset dan teknologi, pengembangan konsep, teori terbaru dan releval, memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) dalam posisi sebagai mentor. Di mana untuk unsur akademisi pada penerapan aplikasi *stunting* terdiri dari, Institut

Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran yaitu Fakultas Kedokteran dengan salah satu kegiatan yang telah dilakukan adalah melaksanakan *workshop stunting*, Universitas Kristen Indonesia yaitu Fakultas Kedokteran dan STIKES Sebelas April Sumedang yang melakukan kajian *stunting*.

Gambar 1.7
Kegiatan *Workshop* dan Sosialisasi *Stunting*



(Sumber: Bappppeda Kabupaten Sumedang)

Kemudian, komunitas memiliki peran sebagai penghubung antar pemangku kepentingan untuk membantu masyarakat dalam keseluruhan proses dan menggerakkan upaya percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Sumedang melalui penerapan aplikasi Simpati (sistem pencegahan *stunting* terintegrasi). Dalam hal ini terdiri dari, Himpunan Ahli Kesehatan Indonesia (HAKLI Sumedang) yang bergerak dalam hal kesehatan lingkungan, Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi Sumedang) yang melakukan penyuluhan gizi.

Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah keterlibatan media yang memiliki peran dalam mendukung publikasi dan promosi aplikasi Simpati (sistem pencegahan *stunting* terintegrasi). Dalam hal ini terdiri dari lembaga penyiaran publikasi lokal eRKS-106,1 FM Inspirasi Sumedang dan Jusyan 92,7 FM Radio Sumedang yang berperan dalam publikasi *stunting*. Adanya sebuah kolaborasi dari berbagai aktor dengan kemampuan

yang berbeda dan saling melengkapi mampu mendorong tercapainya tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip dan strategi yang ditetapkan dalam pelaksanaan aplikasi Simpati (sistem pencegahan *stunting* terintegrasi) sebagai salah satu upaya dalam percepatan penurunan dan pencegahan *stunting* terintegrasi di Kabupaten Sumedang yaitu dengan menerapkan pendekatan (HITS) terdiri dari, Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial, di mana hal ini tercermin dalam lima pilar intervensi konvergensi *stunting* yaitu, adanya komitmen dan visi yang kuat dari Bupati, Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan Instansi dan organisasi masyarakat terkait dalam penerapan aplikasi Simpati. Kemudian, adanya kampanye yang terfokus pada suatu pemahaman, perubahan perilaku, komitmen politik, dan akuntabilitas. Adanya konvergensi program nasional, daerah, dan desa. Adanya kegiatan mendorong ketahanan pangan dan gizi dan yang terakhir adalah adanya pemantauan dan evaluasi. Selain itu terdapat *tagline* “Akselarasi Pembangunan Menuju Sumedang *Zero New Stunting*” yang menjadi dorongan kuat bagi pemerintah beserta seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam mencapai tujuan yaitu menurunkan kasus *stunting* di Kabupaten Sumedang secara optimal.

4.5 Economic, Political, and Social Context

Pada penyelenggaraan aplikasi Simpati (sistem pencegahan *stunting* terintegrasi) di Kabupaten Sumedang tak luput dari faktor ekonomi, politik dan sosial. Konteks ekonomi, politik, dan sosial menjadi sebuah konsep sebab-akibat dalam penerapan *digital government*.

Faktor ekonomi, menurut pemaparan oleh Dr. H. Dony Ahmad Munir, ST., MM, Bupati Sumedang, bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang saat ini berada pada angka 10.26%. Dengan angka tersebut tidak terlalu berpengaruh kepada implementasi aplikasi Simpati. Namun, dengan adanya aplikasi Simpati ini, justru banyak bantuan dari beberapa Instansi, dimana bantuan tersebut dapat berupa pelatihan dalam olahan jamur dan ternak puyuh. Dana profit dari usaha tersebut dialokasikan kepada keluarga yang memiliki anggota keluarga pengidap *stunting*, yang memang kebanyakan dari keluarga dengan ekonomi rendah.

Selanjutnya faktor Politik, dalam implementasi aplikasi Simpati ini juga terdapat kepentingan dari beberapa dewan yang membantu. Dalam hal ini dapat diketahui dengan adanya komitmen dan kesepakatan bersama penurunan dan pencegahan stunting terintegrasi pada saat pelaksanaan Rembuk Stunting.

Setelah itu terdapat faktor sosial, dengan adanya aplikasi Simpati tentunya mendorong kegiatan-kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini dapat berupa bantuan dana kepada keluarga yang terkena *stunting* khususnya keluarga yang tidak mampu, sosialisasi mengenai stunting dan aplikasi Simpati, penyuluhan untuk menanggulangi *stunting*, dan pelatihan kader posyandu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu Kabupaten/Kota di Jawa Barat dengan penderita stunting terbanyak yaitu mencapai 41,08% (Bappeda Jawa Barat, 2018). Mengetahui permasalahan tersebut, pemerintah pun mengambil kebijakan untuk menangani permasalahan stunting, dengan menyelenggarakan program aplikasi Simpati (sistem pencegahan stunting terintegrasi) di Kabupaten Sumedang.

Informasi serta kualitas data yang disajikan dalam platform Simpati ini sudah tersedia dengan baik. Namun dalam pelaksanaan Simpati 2.0, publik masih tidak dapat mengakses secara menyeluruh terkait informasi data stunting pada aplikasi Simpati 2.0. karena pengakses memerlukan email yang terdaftar dan sudah terverifikasi. Sehingga setiap menu tidak bisa diakses berbagai kalangan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *digital governance* pada Simpati 2.0 belum berjalan dengan baik, karena masih ada aspek manajemen informasi data yang belum terintegrasi secara baik, khususnya keterbatasan akses bagi publik itu sendiri.

Saran

Setelah mengetahui hal-hal tersebut, penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya optimalisasi manajemen data pada aplikasi Simpati, dimana perlu adanya data yang selalu update (*real-time updates*), Hal ini diperlukan untuk meminimalisir keterlambatan data yang masuk, karena hal tersebut dapat mempengaruhi lambatnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sekaligus meminimalisir salahnya kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah stunting.
2. Perlu adanya pemerataan informasi dimana aplikasi ini perlu dibuat untuk memudahkan publik dalam mengakses keseluruhan data, tidak hanya *stakeholder* tertentu saja yang dapat memiliki akses.

REFERENSI

- Aminullah, A. (2020). *Angka “Stunting” di Sumedang Naik 3,28 Persen Akibat PSBB*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2020/11/30/17484701/angka-stunting-di-sumedang-naik-328-persen-akibat-psbb>
- BAPPEDA JABAR. (2018). *Ranwal RPJMD kabupaten Sumedang tahun 2019-2023*. <http://bappeda.jabarprov.go.id/documents/ranwal-rpjmd-kabupaten-sumedang-tahun-2019-2023/>
- Cahyadi, A. (2003). E-Government: Suatu Tinjauan Konsep dan Permasalahan. *The Winners*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.21512/TW.V4I1.3796>
- Haskas, Y. (2020). Gambaran Stunting Di Indonesia : Literatur Review. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis*, 15(2), 154–157. <http://jurnal.stikesnh.ac.id/index.php/jikd/article/view/179>
- Kementerian Kesehatan RI. (2018). *Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018*.
- Maryam, S. N. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VI(1).
- Pratama, & Hersya, R. (2015). Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK), Elektronik Rukun Tetangga/Rukun Warga (e-RT/RW) (Studi e-Government di Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Pemerintah Kota Surabaya). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(12), 2128–2132. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/1107>
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- Rinaldi, R. (2012). ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 2(1), 22–34. <https://doi.org/10.31289/JAP.V2I1.945>
- Robbins, S. P. (1996). *Perilaku Organisasi* (Jilid 2). Prenhalindo.
- Sandoval-Almazán, R., Luna-Reyes, L. F., Luna-Reyes, D. E., Gil-Garcia, J. R., Puro-Cid, G., & Picazo-Vela, S. (2017). Building Digital Government Strategies Principles and Practices. In *Public Administration and Information Technology* (Vol. 16, pp. 21–33). Springer International Publishing AG. https://doi.org/10.1007/978-3-319-60348-3_3
- Setya Yunas, N. (2019). Implementasi Konsep Penta Helix dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur. *Matra Pembaruan Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(1), 37–46. <https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.37-46>
- Suryadi, A. (2007). Pemanfaatan ICT Dalam Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh*, 8(2), 83–98. <https://jurnal.ut.ac.id/index.php/jptjj/article/view/537>
- Utami, S. B., & Pancasilawan, R. (2017). Kolaborasi dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(1), 59. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i1.13550>
- Welchman, L. (n.d.). *Managing chaos : digital governance by design*.